

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA  
BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh :  
Windy Safitri  
180810074**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA  
BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :  
Windy Safitri  
180810074**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Windy Safitri  
NPM : 180810074  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa "SKRIPSI" yang saya buat dengan judul:

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 29 Juli 2022



**Windy Safitri**  
**180810074**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA  
BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:**

**Windy Safitri  
180810074**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 29 Juli 2022**



**Anggun Permata Husda, S.E., M.Acc.  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Batam. Penelitian bersifat kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Batam Kecamatan Sekupang yang terdaftar sebagai wajib pajak PBB dengan penarikan sampel menggunakan Slovin mendapatkan 400 responden. Skala yang digunakan *Likert*. Hasil dari penelitian ini menggunakan SPSS form 25. Variabel kesadaran yang dipertegas dengan nilai t hitung sebesar 14,821 telah melebihi 1.971 yang merupakan nilai t tabel pada probabilitas 0,05 dan nilai signifikansi untuk variabel kesadaran bernilai 0,000 tidak melebihi 0,05, variabel kesadaran memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Variabel pengetahuan yang dipertegas dengan nilai t hitung sebesar 4,991 telah melebihi 1.971 yang merupakan nilai t tabel pada probabilitas 0,05 dan nilai signifikansi untuk variabel pengetahuan bernilai 0,000 dan tidak mencapai 0,05. variabel pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Variabel sanksi yang dipertegas dengan nilai t hitung sebesar 1,981 telah melebihi 1.988 yang merupakan nilai t tabel pada probabilitas 0,05 dan nilai signifikansi untuk variabel sanksi bernilai 0,005 dan tidak mencapai 0,05, variabel sanksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Secara simultan memberikan pengaruh kepada variabel dependen. Dengan kata lain, variabel kesadaran, pengetahuan dan sanksi memberikan pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel kepatuhan

**Kata Kunci:** Kesadaran; Pengetahuan; Sanksi; Kepatuhan.

## ABSTRACT

*This study aims to determine the factors that influence taxpayer compliance in paying land and building taxes in Batam City. Research is quantitative. The population in this study are people who live in Bota Batam, Sekupang District, who are registered as PBB taxpayers with sampling using Slovin getting 400 respondents. The Likert scale used. The results of this study use SPSS form 25. The awareness variable which is confirmed by the t-count value of 14.821 has exceeded 1.971 which is the t-table value at probability 0.05 and the significance value for the awareness variable is 0.000 and does not exceed 0.05. significant to compliance. The knowledge variable which is confirmed by the calculated t value of 4.991 has exceeded 1.971 which is the t table value at probability 0.05 and the significance value for the knowledge variable is 0.000 and does not reach 0.05. knowledge variable has a significant effect on compliance. The sanctions variable which is confirmed by the t-count value of 1.981 has exceeded 1.988 which is the t-table value at probability 0.05 and the significance value for the sanctions variable is 0.005 and does not reach 0.05, the sanctions variable has a significant effect on compliance. Simultaneously give effect to the dependent variable. In other words, the variables of awareness, knowledge and sanctions have a simultaneously significant effect on the compliance variable*

**Keywords:** Awareness; Knowledge; Penalty; Obedience.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa peneliti terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, peneliti menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Ibu Anggun Permata Husda, S.E., M.Acc selaku Pembimbing Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
5. Tim Dosen Penguji dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Para responden yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penulis.
7. Bapak, ibu, serta keluarga yang selalu mendukung dan memberi motivasi untuk menjadi yang terbaik.
8. Semua teman-teman seperjuangan di Universitas Putera Batam angkatan 2018. Semoga Allah S.W.T. membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 29 Juli 2022



**Windy Safitri**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR RUMUS .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Batasan Masalah.....	6
1.4. Rumusan Masalah.....	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Manfaat penelitian .....	8
1.6.1. Manfaat teoritis.....	8
1.6.2. Manfaat praktis .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1. Teori Dasar Penelitian.....	9
2.1.1. Pajak .....	9
2.1.2. Pajak Bumi dan Bangunan .....	10
2.2. Teori Variabel.....	12
2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
2.2.1.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB.....	12
2.2.2. Kesadaran Wajib Pajak .....	13
2.2.2.1. Indikator Kesadaran Wajib Pajak .....	14
2.2.3. Pengetahuan pajak .....	14
2.2.3.1. Indikator Pengetahuan Pajak .....	15
2.2.4. Sanksi.....	16
2.2.4.1. Indikator Sanksi.....	17
2.3. Penelitian Terdahulu .....	17
2.4. Kerangka Pemikiran .....	20
2.5. Hipotesis .....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	22
3.1. Desain Penelitian .....	22
3.2. Operasional Variabel .....	22
3.2.1. Variabel Terikat ( <i>Dependent</i> ).....	23
3.2.2. Variabel Independen ( <i>Independen Variable</i> ) .....	23
3.3. Populasi dan Pengambilan Sampel .....	25
3.3.1. Populasi.....	25
3.3.2. Sampel .....	25
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	27
3.6. Metode Analisis Data.....	28



3.6.1.	Analisis Deskriptif .....	28
3.6.2.	Uji Kualitas Data .....	28
3.6.2.1.	Uji Validitas Data .....	28
3.6.2.2.	Uji Reliabilitas.....	29
3.6.3.	Uji Kualitas Instrumen .....	29
3.6.3.1.	Uji Normalitas .....	29
3.6.3.2.	Uji Multikolinieritas .....	29
3.6.3.3.	Uji Heteroskedastisitas.....	30
3.6.4.	Uji Pengaruh.....	30
3.6.4.1.	Analisis Regresi Linear Berganda .....	30
3.6.4.2.	Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	31
3.6.5.	Uji Hipotesis.....	31
3.6.5.1.	Uji t.....	31
3.6.5.2.	Uji F.....	31
3.7.	Rentang waktu Data Penelitian .....	32
3.7.1.	Lokasi Penelitian .....	32
3.7.2.	Jadwal penelitian .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>34</b>
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	34
4.2.	Deskripsi Karakteristik Responden .....	34
4.2.1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	35
4.2.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	36
4.2.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan .....	37
4.2.4.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	38
4.2.5.	Karakteristik Responden Berdasarkan domisili di Kota Batam (Kecamatan Sekupang) 39	
4.2.6.	Karakteristik Responden Yang Terdaftar Memiliki Objek PBB .....	40
4.3.	Analisis Data .....	41
4.3.1.	Analisis Deskriptif .....	41
4.3.2.	Uji Kualitas Data .....	43
4.3.2.1.	Hasil Uji Validitas .....	43
4.3.2.2.	Hasil Uji Realiabilitas .....	46
4.3.3.	Uji Kualitas Instrumen .....	47
4.3.3.1.	Hasil Uji Normalitas .....	47
4.3.3.2.	Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
4.3.3.3.	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	50
4.4.	Uji Pengaruh.....	51
4.4.1.1.	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	51
4.4.1.2.	Hasil Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	52
4.5.	Pengujian Hipotesis .....	53
4.5.1.	Hasil Uji t.....	53
4.5.2.	Hasil Uji F.....	54
4.6.	Pembahasan.....	55
4.6.1.	Pengaruh kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	55
4.6.2.	Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB .....	55
4.6.3.	Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.....	56
4.6.4.	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB	57
4.7.	Implikasi Hasil Penelitian .....	57
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>59</b>

5.1	Simpulan .....	59
5.2	Saran .....	59
	DAFTAR PUSTAKA .....	61
	LAMPIRAN 1 PENDUKUNG PENELITIAN.....	62
	LAMPIRAN 2 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97
	LAMPIRAN 3 SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Desain Penelitian .....	22
Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	35
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	36
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.....	37
Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	39
Gambar 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Berdomisili di Kota Batam .....	40
Gambar 4.5 Karakteristik Responden Terdaftar Objek PBB .....	41
Gambar 4.6 Histogram Regression Residual.....	47
Gambar 4.7 P-plot Regression .....	48

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam Tahun 2017-2021 .....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian .....	23
Tabel 3.2 Skala <i>Likert</i> .....	28
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian .....	32
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	35
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	36
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.....	37
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	38
Tabel 4.5 Profil Responden Berdomisili di Kota Batam .....	40
Tabel 4.6 Profil Responden Terdaftar Objek PBB.....	41
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kesadaran .....	43
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pengetahuan.....	44
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Sanksi .....	45
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas kepatuhan.....	45
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas.....	46
Tabel 4.12 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	48
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
Tabel 4.14 Hasil Uji Glejser .....	50
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	51
Tabel 4.16 Hasil Analisis Koefisien Determinasi .....	52
Tabel 4.17 Hasil Uji t.....	53
Tabel 4.18 Hasil Uji F.....	54

## DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Metode Slovin .....	26
Rumus 3.2 Regresi Linear Berganda.....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia negara yang terus melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, perubahan penting lainnya adalah meningkatkan pembangunan fasilitas umum guna meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti jembatan, jalan raya, rel kreta api dan sebagainya. Untuk melakukan perubahan tersebut tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit, untuk itu pemerintah perlu meningkatkan pendapatan Negara.

Sumber pendapatan tahunan di Indonesia berasal dari pendapatan pajak, pinjaman, keuntungan BUMN, pengelolaan Sumber Daya Alam, sitaan terhadap sanksi pidana, percetakan uang atau sumbangan, dan sebagainya. Dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Indonesia tampak bahwasannya pajak mempunyai kontribusi paling besar bagi negara. Sebagai kontribusi terbesar, tentunya di perlukan pemungutan dan pengelolaan yang sangat baik. Pemungutan dan pengelolaan pajak di bagi menjadi 2 yaitu pajak yang di pungut dan kelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang di pungut dan dikelola oleh pemerintah daerah yaitu bupati atau walikota selanjutnya dilimpahkan kepada kecamatan yang melibatkan seluruh perangkat kelurahan atau desa serta instansi yang membantu pemungutan pajak (Muttaqin & Anggra, 2018).

Penggolongan cara pemungutan dan pengelolaan pajak ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahannya agar kawasan yang tak terjangkau atau jauh dari pemerintah pusat tetap dapat meningkatkan wilayahnya melalui pemerintah daerah. Penyerahan kewenangan ini dalam rangka mewujudkan desentralisasi yang merata. Dalam kewenangannya, pemerintah daerah diberikan hak untuk mengambil hasil dari penerimaan daerah yang salah satu contohnya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB).

PBB merupakan pajak pusat yang dilimpahkan wewenangnya kepada wilayah. Pernyataan ini dapat dilihat pada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Wilayah dan Retribusi Wilayah. PBB menjadi pajak wilayah sehingga menjadi pemasukan asli daerah daerah pemungutan dan pengelolaannya di lakukan oleh pemerintah daerah (Hidayat & Gunawan, 2022). PBB yaitu iuran bersifat wajib yang harus disetorkan ke kas negara atas kepemilikan, penguasaan dan benefit dari bumi dan bangunan. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) merupakan dasar pengenaan PBB.

Kepatuhan terhadap pembayaran pajak akan terjadi baik dilihat sebagai norma atau kebiasaan. hal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat ditelaah lebih lanjut karena kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Pada tabel di bawah ini peneliti menyajikan data target dan realisasi penerimaan PBB Kota Batam dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

**Tabel 1.1** Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam Tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASI
2017	131.579.188.137	119.265.954.703	90.64 %
2018	158.583.296.894	155.040.093.412	97.77 %
2019	165.000.000.000	153.281.145.882	92.90 %
2020	206.000.000.000	167.196.359.433	81.16 %
2021	199.557.681.369	187.797.064.729	94.11 %

**Sumber:** [siependa.batam.go.id](http://siependa.batam.go.id)

Dilihat dari tabel di atas bisa dikatakan bahwasanya penerimaan Kota Batam sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 penerimaan PBB mencapai 90.64% dari target. pada tahun 2018 mengalami peningkatan persentase 7,13%. selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 4,87%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu mencapai 11,74%, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar 12,95%.

Didasarkan data yang peneliti dapatkan, bisa disimpulkan bahwasanya masih terdapat kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB yang jika diperhatikan realisasi penerimaan PBB disetiap tahun mengalami kenaikan ataupun penurunan yang mana bisa disebut tidak seimbang dengan target yang ditetapkan. Kemungkinan hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran, pengetahuan, serta kurang tegasnya penerapan sanksi pajak.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pajak sangat penting agar dapat meningkatkan konsistensi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB. Kesadaran akan pajak adalah perasaan yang muncul dalam diri Wajib Pajak



tentang kewajibannya melakukannya tanpa ada paksaan serta dengan ikhlas. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bayar pajak, maka akan meningkatkan penerimaan APBN dan pemerataan pembangunan bangsa. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dapat membantu lebih banyak orang memenuhi kewajibannya dengan mendaftar selaku wajib pajak ataupun menjadikan dirinya wajib pajak yang membayar kewajiban perpajakannya. (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Selain faktor kesadaran, pengetahuan tentang pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB. Rendahnya pengetahuan WP mengenai pajak dapat berakibat WP cenderung kurang patuh menunaikan kewajiban pajak dan tidak menyadari kewajibannya. Seandainya wajib pajak mempunyai pengetahuan yang lebih dalam hal perpajakan, semestinya wajib mengetahui kemudahan dalam membayar pajak dan pentingnya pajak bagi perekonomian negara sehingga pada akhirnya bisa mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak (Sutarjo & Effendi, 2020). Maksud dari pengetahuan pajak adalah tau dan paham akan tata cara umum perpajakan seperti pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT), mengetahui batas akhir jatuh tempo, denda, serta tempat pembayarannya PBB. Pengetahuan tentang perpajakan merupakan hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki wajib pajak, jika tidak memiliki pengetahuan pajak akan berakibat kecenderungan tidak memunaikan kewajibannya bahkan melakukan penyimpangan. (Hidayat & Gunawan, 2022).

Faktor berikutnya adalah sanksi dalam pajak, sanksi pajak dapat dikatakan faktor penting untuk mendidik WP yang tidak patuh dalam aturan perpajakan saat ini. Kepatuhan wajib pajak ditingkatkan dengan menekan wajib pajak untuk tidak melakukan penghindaran pajak atau melakukan kegiatan ilegal yang bertujuan untuk penyelundupan pajak. Pengenaan sanksi yang tidak berat dapat menimbulkan pengabaian bagi wajib pajak yang melanggar pajak, sehingga aturan sanksi yang tetapka pemerintah akan sangat menentukan berhasil tidaknya penegakan pajak. (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Variabel-variabel yang dipakai dalam peneliti ditunjang oleh penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020). Dengan judul Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB, dengan hasil yaitu kesadaran, pengetahuan dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian berikutnya yang di lakukan oleh Sutarjo & Effendi (2020). Dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PBB Kota Batam. Dengan hasil bersama-sama punya efek positif serta signifikan antara kesadaran wajib pajak serta pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Batam.

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini berjudul **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA BATAM "**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak rendah, mengakibatkan penerimaan pajak tidak maksimal.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban PBB.
3. Pengetahuan masyarakat tentang kewajiban PBB yang masih minim
4. Sanksi pajak yang tidak tegas mengakibatkan wajib PBB cenderung mengabaikan kewajiban pajaknya.

## **1.3. Batasan Masalah**

Batasan-batasan masalah di perlukan dalam penelitian dengan tujuan agar pembahasan dapat terarah sesuai harapan. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB Kota Batam diukur dengan variabel: kesadaran (X1), pengetahuan (X2), sanksi (X3).
2. Objek penelitian ini adalah masyarakat yang berkewajiban membayar PBB di Kota Batam Kecamatan Sekupang.
3. Responden dalam penelitian ini wajib pajak bumi bangunan yang membayar pajak tahunannya.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan, pertanyaan peneliti di rumuskan yaitu :

1. Apakah kesadaran secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?
2. Apakah pengetahuan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?
3. Apakah sanksi secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?
4. Apakah kesadaran, pengetahuan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari pertanyaan diatas, tujuan penelitali ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?

4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran, pengetahuan dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?

## **1.6. Manfaat penelitian**

### **1.6.1. Manfaat teoritis**

1. Universitas Putera Batam

Penelitian ini dapat menambah karya ilmiah di kota Batam dan berguna sebagai bahan referensi selanjutnya di Universitas Putera Batam.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat menambah wawasan dan lebih memahami perpajakan khususnya PBB.

### **1.6.2. Manfaat praktis**

1. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman khususnya dalam hal penelitian pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi Wajib Pajak PBB

Bagi Wajib Pajak menjadi pengetahuan akan pentingnya kesadaran, pengetahuan, serta sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan yang mana sangat penting dalam perekonomian Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1. Pajak**

Berbagai penjabaran pajak menurut sumber dan para ahli :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya (Salmah, 2020).
2. Pajak merupakan kontribusi masyarakat terhadap pendapatan nasional berdasarkan undang-undang perpajakan, di mana tidak ada kompensasi langsung dari layanan, yang dapat dilakukan serta paksaan dengan tujuan fasilitas pendukung atau kesejahteraan umum. (Krismanto, 2020).
3. Iuran wajib berupa uang ataupun barang, yang dipungut oleh pemerintah sesuai aturan norma dan hukum, yang bertujuan untuk menggapai kesejahteraan umum (Ma'rif & Supatminingsih, 2020).
4. Pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara untuk memberikan sebagian dari harta sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat dipaksakan sesuai aturan pemerintah namun bukan sebagai hukuman. Berguna untuk kesejahteraan umum namun tidak terdapat jasa timbal balik secara langsung (Siti et al., 2022).

Dilihat dari penjelasan di atas, menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran kepada kas negara yang harus dibayar setiap wajib pajak. Yang mana pembayaran telah ditentukan oleh undang-undang dengan tidak merasakan manfaat secara langsung. Pajak bertujuan untuk digunakan dalam mendanai pengeluaran publik terkait terkait tugas pemerintah

Menurut Pravasanti (2020) pemungutan dan pengelolaan pajak di bedakan menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Pajak pusat, dipungut pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- 2) Pajak daerah di pungut pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBB.

### **2.1.2. Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah “Pajak yang besaran tarifnya ditentukan oleh kepemilikan atas objek bumi, tanah, atau bangunan di mana subjek pajak tidak ikut menentukan besar pajak” (Herlina, 2020). “Bumi termasuk permukaan dan tubuh serta di bawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia, sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam secara tetap pada tanah dan atau perairan” (Purba & Janrosi, 2020).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa PBB adalah pajak atas tanah dan bangunan, dimana besarnya pajak tidak ditentukan dari keadaan subjek (siapa yang membayar), melainkan dari objek bumi dan bangunan itu sendiri.

Berasaskan UU No 12 Tahun 1985 mengenai PBB yang telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 menyatakan bahwa tarif PBB yaitu sebesar 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Rumus perhitungan PBB:

$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJOP} \\ &= 0.5\% \times \text{NJOP} \end{aligned}$
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Rumus 2.1** Tarif Pajak

Keterangan :

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

NJKP : Nilai Jual Kena Pajak

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

NJOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Terdapat 2 metode pembayaran PBB yaitu secara *online* dan *Offline* :

1. Metode Online, pembayaran PBB sudah sangat mudah yang mana dapat dilakukan pembayaran melalui ATM atau M-Banking sesuai bank yang telah tercantum di SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).
2. Metode Offline, wajib pajak PBB bisa membayar dengan datang langsung ke Kantor Pos atau ke Bank yang tercantum pada SPT. Wajib pajak juga dapat melakukan pembayaran kepada petugas yang telah diunjuk oleh kelurahan sebagai petugas PBB secara resmi.



## **2.2. Teori Variabel**

### **2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kepatuhan atau patuh adalah taat pada aturan. Dengan kata lain kepatuhan adalah taat kepada aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak bersedia untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Salmah, 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari keputusan seseorang untuk melaksanakan kewajibannya atau menghindari kewajiban pajaknya. (Wilestari & Ramadhani, 2020).

Berbagai pendapat para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **2.2.1.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB.**

Indikator-indikator kepatuhan pajak menurut (S. Kurniawati et al., 2022).

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak dan sanksinya.
3. Persyaratan pembayar pajak telah dipenuhi.
4. Pengetahuan adanya jatuh tempo pembayaran pajak
5. Tepat waktu dalam pembayaran pajaknya

### **2.2.2. Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesadaran adalah itikad baik seseorang dalam memenuhi kewajibannya dengan tulus didasarkan pada hati nurani dan ketulusan. tax awareness adalah itikad baik wajib pajak untuk memahami manfaat dan fungsi perpajakan sebagai sumber pendapatan negara (Hidayat & Gunawan, 2022). Kesadaran wajib pajak tercermin dari kesungguhan dan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, tercermin dari pemahaman wajib pajak tentang penggunaan pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Kesadaran pajak merupakan elemen yang berasal dari diri seseorang untuk mengetahui kenyataan serta bagaimana mereka berperilaku pada kenyataan. Kesadaran pajak artinya mengetahui pajak merupakan hal wajib dengan tanpa paksaan dari siapapun (S. Kurniawati et al., 2022). Kesadaran dalam mematuhi pajak dapat dikatakan telah ikutserta dalam pembangunan negara. Wajib pajak yang dengan sadar menunda, serta memanipulasi jumlah kewajiban pajaknya merupakan tindakan yang sangat merugikan negara (Salmah, 2020). Wajib pajak yang mempunyai kesadaran akan pajak akan terus melakukan kewajibannya karena mengerti dan sadar bahwa pajak ditetapkan oleh hukum dan dapat di tegakkan.

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan kesadaran pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan. Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam pembayaran pajak,

jika wajib pajak sudah sadar dan melunasi kewajibannya maka pajak akan mengalami peningkatan dan tidak terdapat lagi wajib pajak yang tidak melunasi pajaknya.

#### **2.2.2.1. Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Indikator-indikator kesadaran pajak menurut (S. Kurniawati et al., 2022).

1. Kesadaran akan fungsi
2. Kesadaran membayar pajak bukan karna paksaan
3. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan
4. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang
5. Kesadaran akan hak dan komitmen pajak.

#### **2.2.3. Pengetahuan pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan artinya hal yang berkenaan dengan mata pelajaran seperti pandai dan memahami.” Pengetahuan berhubungan dengan proses pembelajaran.” (Ma’ruf & Supatminingsih, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan dan mengejar arahan atau strategi tertentu dalam kaitannya dengan meneruskan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. pengetahuan perpajakan diteruskan pada pemahaman wajib pajak tentang diteruskannya undang-undang prosedur perpajakan yang benar dalam bentuk pengetahuan tentang fungsi perpajakan, prosedur pembayaran, pengetahuan tentang sanksi pajak dan diteruskannya lokasi pembayaran pajak." pengetahuan pajak adalah pemahaman

tentang pengesahan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang harus dimiliki oleh seluruh wajib pajak (Hidayat & Gunawan, 2022).

Menurut penjelasan dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pada pemahaman wajib pajak tentang undang-undang perpajakan, undang-undang perpajakan dan prosedur perpajakan yang dapat digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan (Sutarjo & Effendi, 2020) sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Pekerjaan
3. Pengalaman
4. Usia
5. Kebudayaan
6. Minat
7. Paparan informasi
8. Media

#### **2.2.3.1. Indikator Pengetahuan Pajak**

Indikator-indikator pengetahuan pajak menurut (Sutarjo & Effendi, 2020) sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.
2. Pengetahuan tentang peraturan pajak

3. Mengetahui cara mendaftar sebagai wajib pajak
4. Pengetahuan terhadap tatacara pembayaran pajak
5. Pengetahuan terhadap tarif

#### **2.2.4.Sanksi**

Sanksi merupakan konsekuensi yang diterima bagi seseorang yang tidak mengikuti bahkan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Aturan yang dimaksud adalah instruksi mengenai hal yang tidak diperbolehkan. Dikenakannya sanksi bertujuan agar aturan tidak mudah dilanggar oleh wajib pajak. Sanksi pajak telah ditetapkan mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat.

Sanksi pajak merupakan jaminan dipatuhinya pajak yang mana sesuai undang-undang pajak (Herlina, 2020). Pemerintah sangat mengarpakan dengan adanya sanksi denda dan hukuman pidana yang cukup besar dapat wajib pajak lebih patuh dalam membayar PBB. Penerapan sanksi pajak yang ketat membuat wajib pajak semakin rugi dan sehingga memilih untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Wilestari & Ramadhani, 2020).

Pengenaan sanksi pajak diterapkan sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak oleh wajib pajak seperti yang diamanatkan dalam pengesahan Undang-Undang Perpajakan. Pemberlakuan sanksi pajak terhadap wajib pajak dapat menyebabkan dimulainya kepatuhan terhadap kewajiban pajak oleh wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan mematuhi (karena tekanan) karena mereka berpikir ada sanksi serius

karena tindakan ilegal dalam upaya mereka menyelundupkan pajak (Wilestari & Ramadhani, 2020).

#### 2.2.4.1. Indikator Sanksi

Indikator sanksi pajak (Wilestari & Ramadhani, 2020) antara lain :

1. Pelanggaran peraturan perpajakan berat yang bisa menyebabkan sanksi pidana.
2. Pelanggaran peraturan perpajakan ringan yang bisa menyebabkan sanksi administrasi
3. Memberikan sanksi berat untuk mendidik wajib pajak.
4. Tegasnya sanksi pajak yang menganggap individu sam.
5. Sanksi yang diterima ditentukan oleh pelanggaran.
6. Pemberian sanksi sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
7. Kedisiplinan dan kepatuhan pajak bisa diciptakan dengan sanksi berupa denda

### 2.3. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Salmah, 2020)	Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> </ol>

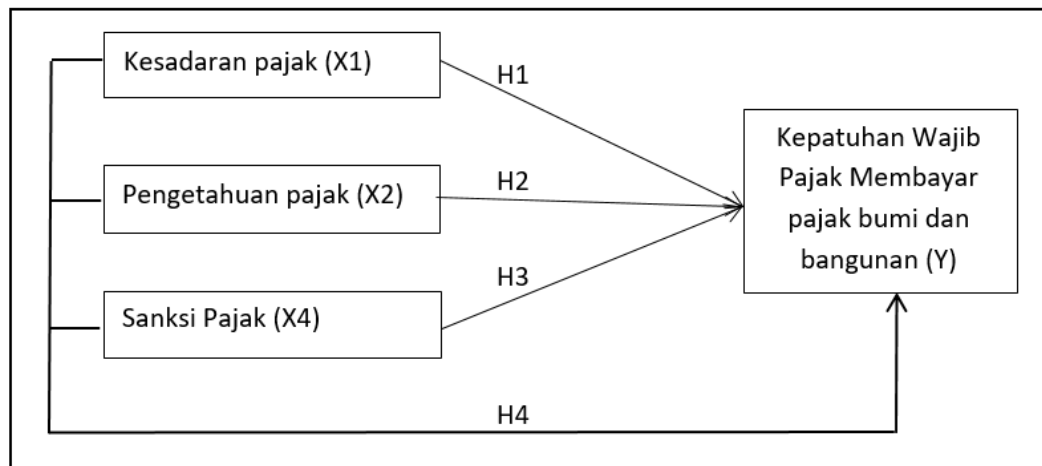
2	(Ma'ruf & Supatminingsih, 2020)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Sanksi pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>3. Pemahaman pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>4. Kualitas pelayanan pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> </ol>
3	(Pravasanti, 2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Pemahaman prosedur perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP</li> <li>3. Kesadaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP</li> <li>4. Sanksi pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>5. Sosialisai perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP</li> </ol>
4	(Hidayat & Gunawan, 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP</li> <li>2. Sanksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP</li> <li>3. Kualitas Pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP</li> </ol>
5	(Herlina, 2020)	Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Kesadaran pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> </ol>

		Bangunan Di Kabupaten Kerinci	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kualitas pelayanan pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>4. Sanksi pajak, kesadaran, kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP</li> </ol>
6	(Viola Syukrina E Janros., 2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dikota Batam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Sanksi pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> </ol>
7	(Sutarjo & Effendi, 2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Batam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Pengetahuan wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>3. Kesadaran dan pengetahuan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP</li> </ol>
8	(S. Kurniawati et al., 2022)	Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemimpinan Kepala Desa berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>3. Kepemimpinan Kepala Desa dan kesadaran pengetahuan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP</li> </ol>
9	(Wilestari & Ramadhani, 2020).	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>2. Sanksi berpengaruh yang tidak signifikan pada kepatuhan WP</li> <li>3. Kepercayaan wajib pajak berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP</li> </ol>



## 2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan acuan dan pedoman dalam penelitian ini yang akan dibuat sebagai berikut :



**Gambar 2.1.** Kerangka Pemikiran

## 2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari hasil rumusan masalah, dikatakan sementara karena masih berlandaskan teori belum fakta empiris yang di rumuskan di bawah ini :

H<sub>1</sub> : Kesadaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam

H<sub>2</sub> : Pengetahuan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam.

H<sub>3</sub> : Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam.

H<sub>4</sub>: Kesadaran, Pengetahuan, dan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini berguna untuk menggambarkan alur dan pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Berikut ini akan digambarkan atau didesain sebuah penelitian kuantitatif yang terdapat dalam penelitian ini :



**Sumber:** Peneliti, 2022

**Gambar 3. 1** Desain Penelitian

### 3.2. Operasional Variabel

Operasional variable sangatlah penting dalam penelitian, yang mana berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengumpulan data. Selain

itu operasional variabel berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan mengukur variabel sehingga sesuai dengan sumber daya yang dikumpulkan peneliti (Sugiyono, 2020).

### 3.2.1. Variabel Terikat (*Dependent*)

Variable *dependen* ialah variabel yang dipengaruhi ataupun menjadi dampak sebab terjadinya variabel independen (Purba & Janrosi, 2020). Variabel penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak menjadi variabel dependen.

### 3.2.2. Variabel Independen (*Independent Variable*)

Variabel independen ialah variabel yang mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab perubahan variabel dependen (Purba & Janrosi, 2020). Dalam penelitian ini kesadaran, pengetahuan, dan sanksi menjadi faktor independen.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menjabarkan operasional variabel dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1** Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)	Suatu tindakan untuk mentaati ajaran atau peraturan yang memiliki tuntutan	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak dan sanksinya. 3. Persyaratan pembayar pajak telah dipenuhi. 4. Pengetahuan adanya jatuh tempo pembayaran pajak	<i>Likert</i>

			5. Tepat waktu dalam pembayaran pajaknya	
2	Kesadaran Perpajakan (X1)	Suatu kondisi dimana WP mengetahui dan menghargai peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya	1. Kesadaran akan fungsi 2. Kesadaran membayar pajak bukan karna paksaan 3. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan 4. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang 5. Kesadaran akan hak dan komitmen pajak.	<i>Likert</i>
3	Pengetahuan pajak (X2)	Ilmu mengenai perpajakan dan paham hal-hal kewajiban perpajakan yang dimiliki WP	1. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan. 2. Pengetahuan tentang peraturan pajak 3. Mengetahui cara mendaftar sebagai wajib pajak 4. Pengetahuan terhadap tatacara pembayaran pajak 5. Pengetahuan terhadap tariff	<i>Likert</i>
4	Sanksi Pajak (X3)	sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan	1. Pelanggaran aturan pajak berat dikenakan sanksi pidana. 2. Pelanggaran aturan pajak ringan dikenakan sanksi administrasi. 3. Pemberian sanksi berat dengan tujuan mendidik pembayar pajak. 4. Sanksi pajak bersifat tegas tanpa membeda – bedakan individu.	<i>Likert</i>

			5. Besar kecilnya pelanggaran menentukan seberapa berat sanksi yang diterima.	
			6. Sanksi yang diterima berlandaskan semua aturan pajak yang berlaku.	
			7. Sanksi denda merupakan sanksi penting untuk menciptakan kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak	

### 3.3. Populasi dan Pengambilan Sampel

#### 3.3.1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan kriteria merupakan salah satu Wajib Pajak yang melaporkan PBB di Kota Batam. Berdasarkan pada ketetapan surat pemberitahuan pajak terhutang yang diterima Jumlahnya wajib pajak PBB P2 perdesaan dan perkotaan tahun 2019 sebanyak 316.044 (Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam).

#### 3.3.2. Sampel

Peneliti ini memakai teknik *non probabilistic sampling* guna penarikan sampel, tidak terdapat teknik sampel yang punya kesempatan yang sama guna tiap populasi ataupun populasi yang terpilih, serta teknik sampling yang dipakai ialah purposive sampling, yakni teknik penarikan sampel pada beberapa aspek tertentu (Sugiyono, 2019). Berikut, peneliti menentukan kriteria-kriteria responden, secara spesifik:

1. Responden penelitian ini adalah Wajib pajak yang melaporkan PBB di Kota Batam.
2. Responden yang sudah paham dan perhatian dalam pelaporan PBB, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Berusia dewasa siap untuk melaporkan PBB (17 tahun keatas)

Sampel ditarik dari populasi. Sampel yang digunakan harus sifatnya mewakili, disebabkan keterbatasan waktu, tenaga, serta anggaran yang mempengaruhi populasi tersebut. Maka besar sampel yang diambil dalam penelitian ini memakai rumus Slovin. yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad \textbf{Rumus 3.1 Metode Slovin}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

1 = Konstanta

e<sup>2</sup> =Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir sebesar 5

$$n = \frac{316.044}{(316.044) (0,05)^2 + 1}$$

$$n = \frac{316.044}{791,11}$$

$$n = \mathbf{399,49 \text{ (Dibulatkan 400)}}$$

Didasarkan perhitungan di atas, banyaknya sampel pada penelitian ini adalah 400 responden.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner melalui *Google form* yang akan di berikan ke pada 400 responden dan di olah melalui aplikasi SPSS versi 25.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua, seperti berupa data angka yang menggambarkan jumlah penduduk Kota Batam untuk menarik jumlah wajib pajak melaporkan PBB dikota Batam.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Tahapan terpenting dalam penelitian ini yakni teknik pengumpulan data, karna analisi dapat di lakukan bila data telah terkumpul dan selanjutnya dilakukan keimpulan. Data yang akan dikumpulkan harus valid serta reliabel supaya bisa dipakai gunamenguji hipotetis yang telah dirumuskan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini memakai kuesioner dan setelah itu dipercoba melalui SPSS versi 25. Kuesioner ialah teknik pengumpulan data yang menyajikan berbagai pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya guna responden jawab. Perihal ini ialah cara yang efektif jika secara pasti peneliti mengetahui variabel yang hendak diukur serta apa yang diinginkan dari responden. (Sugiyono, 2019). Pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini adalah



Skala *likert*. Skala *likert* dilakukan untuk menilai perilaku, tanggapan serta wawasan sesuatu perkelompok atau perorangan mengenai hubungan sosial. Sugiyono, (2020)

**Tabel 3.1** Skala *Likert*

Skala Likert		Nilai
(STS)	Sangat Tidak Setuju	1
(TS)	Tidak Setuju	2
(N)	Netral	3
(S)	Setuju	4
(SS)	Sangat Setuju	5

**Sumber:** (Sugiyono, 2020)

### 3.6. Metode Analisis Data

#### 3.6.1. Analisis Deskriptif

Secara umum analisis deskriptif digunakan untuk memberikan informasi gambaran mengenai hasil karakteristik dari variabel yang diteliti berdasarkan data yang telah terkumpul. Untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dengan cara mendapatkan rentang skala dengan cara menentukan *Minimum Score* dan *Maximum Score* (Indriantoro & Supomo, 2019).

#### 3.6.2. Uji Kualitas Data

##### 3.6.2.1. Uji Validitas Data

Uji validitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui valid atau tidaknya kuesioner yang telah di peroleh dalam penelitian. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Jika

hasil dari nilai  $r$  hitung lebih besar dari nilai  $r$  tabel maka berarti signifikan dan dapat dikatakan valid (Kurniawati, 2019).

### **3.6.2.2. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrument kuesioner dapat digunakan lebih dari 1 kali akan menghasilkan data yang konsisten setidaknya dari responden yang sama. Dalam uji ini peneliti menggunakan formula yaitu rumus *Cronbach Alpha* yang jika nilai Koefisien *Cronbach Alpha*  $> 0,06$  berarti pernyataan yang digunakan telah reliabel

### **3.6.3. Uji Kualitas Instrumen**

#### **3.6.3.1. Uji Normalitas**

Uji ini dilakukan untuk melihat data terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji ini menggunakan uji *kolmogorov smirnov* dengan syarat signifikansi  $< 0,5$  dinyatakan data tidak terdistribusi normal (Priyatno, 2019). Kemudian menggunakan grafik histogram dan *porability plot* dengan melihat penyebaran titik-titik yang mendekati garis diagonal maka dinyatakan data terdistribusi secara normal. Kemudian dari sisi kurva bisa dilihat jika berbentuk lonceng simetris maka data terdistribusi normal.

#### **3.6.3.2. Uji Multikolinieritas**

Uji ini untuk melihat dalam model regresi terdapat korelasi antar variable bebas. Model dikatakan tidak mengalami gejala multikolinieritas jika tidak

terdapat korelasi antara variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan Untuk analisis *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Faktor* (VIF), bila nilai VIF > 10 dapat dinyatakan terjadi gejala multikolinieritas (Hanum, 2018).

### 3.6.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini untuk melihat ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya dalam model regresi. Uji ini menggunakan teknik *glejser*, meneruskan gejala heteroskedastisitas telah diuji pada saat persiapan model regresi, termasuk penumpukan tertinggi dengan variabel independen. Jika semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual  $\alpha = 0,05$  maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Hanum, 2018).

### 3.6.4. Uji Pengaruh

#### 3.6.4.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan rumus (Sanusi, 2019):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

**Rumus 3.2** Regresi Linear Berganda

**Sumber:** (Sanusi, 2020)

Y = Kepatuhan

X1, X2, X3 = Kesadaran, Pengetahuan, Sanksi

a = konstanta

b1,, b3 = koefisien regresi

e = variabel pengganggu

### 3.6.4.2. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Uji ini menggunakan nilai *adjusted R square*. Agar *R square* bernilai tinggi yang berarti dapat menjelaskan variabel dependen perlu ditambahkan variabel lain (Khokhar et al., 2019).

### 3.6.5. Uji Hipotesis

#### 3.6.5.1. Uji t

Uji t ini untuk melihat secara parsial apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan signifikansi 0.05 (Indrajaya, 2018). Kriteria uji t sebagai berikut:

1. Jika nilai t hitung  $>$  t tabel dan signifikansi  $<$  0,05 berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima secara tidak langsung variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika t hitung  $<$  t tabel dan signifikansi  $>$  0,05 berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak secara tidak langsung variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 3.6.5.2. Uji F

Uji ini untuk menentukan pengaruh variabel independen secara bersama terhadap variabel dependennya. Jika nilai  $F <$  0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika nilai  $F >$  0,05



Pembagian Kuesioner																		
Penyerahan Kuesioner																		
Pengolahan data																		
Analisis data																		
Jurnal																		
Pengumpulan Softcover																		

**Sumber:** Peneliti, 2022